



# **PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI GUNA MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DAN TATA PELAPORAN YANG SESUAI TERHADAP PENGELOLAAN ASET TETAP (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG)**

**Elfa Fitriani, Kusmilawaty**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

## **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tetap yang telah dilaksanakan oleh Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mulai sekitar tahun 2016 untuk menyampaikan data-data yang diperlukan untuk keperluan pertanggungjawaban atas pelaksanaan uang teritorial dan sumber daya. Pengelolaan Aset Provinsi merupakan salah satu administrasi yang harus diurus dengan baik sehingga sumber daya menjadi model yang mendasari otoritas publik. Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan landasan kerangka data pembukuan sumber daya tetap provinsi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan ini merupakan semacam eksplorasi yang jelas, sumber informasi yang diambil adalah informasi esensial dan informasi opsional. Penyelidikan kontekstual dari efek samping dari studi ini harus terlihat bahwa info, interaksi, dan sub-bidang hasil yang besar namun masih ada kesalahan yang berhubungan dengan masukan informasi dan organisasi sering menghadapi pengaruh yang mengganggu dan sumber daya/properti teritorial yang layak dewan Kerangka kerja secara umum sangat besar dari perolehan, penyusunan, pengakhiran kerangka, penggunaan, penggunaan, pengorganisasian, pemeliharaan/pengamanan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan belum ada flowchart yang menarik dan siklus rutin dalam organisasi sumber daya tetap memiliki tempat dengan distrik.

**Kata Kunci:** Kerangka Data Akuntansi, Aset Tetap Barang Milik Daerah.

## **A. PENDAHULUAN**

Di bidang keuangan, inovasi yang terus berkembang mempengaruhi perkembangan setiap yayasan pemerintahan. Isu-isu yang dialami oleh instansi pemerintah juga terus menjadi yang paling kacau dalam pengenalan laporan anggaran. Laporan moneter pemerintah adalah catatan yang dapat diverifikasi yang dapat digunakan untuk melihat kondisi otoritas publik saat ini dan masa lalu, dan memastikan presentasi otoritas publik dalam ringkasan anggaran.

Legislatif daerah, baik di tingkat biasa maupun daerah/kota, menjadi penentu pergantian peristiwa provinsi. Dalam melaksanakan kemerdekaan daerah terkait dengan konsekuensi kekayaan teritorial, strategi dewan, administrasi negara provinsi memainkan peran penting dalam mengawasi sumber daya dan memberikan kesan positif sesuai dengan daerah setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, otoritas publik sebenarnya membutuhkan komponen pendukung seperti data yang bagus. Kerangka kerja dalam mengerjakan administrasi yang hebat.

Sumber daya yang tetap sangat penting dalam mendukung pelaksanaan suatu kantor administrasi mengingat sumber daya yang layak berfungsi sebagai bagian pendukung dalam menyelesaikan suatu gerakan untuk membangun efisiensi suatu organisasi administrasi. Oleh karena itu, tingkat sumber daya tetap eksekutif menggabungkan mengatur kebutuhan dan perencanaan, perolehan, penggunaan, penggunaan, keamanan dan pemeliharaan, penilaian, akhir, bergerak, organisasi, arah, pengawasan, dan kontrol. Jenis dan ukuran sumber daya tetap di kantor-kantor pemerintah bergantung pada pergantian peristiwa dan pelaksanaan organisasi otoritas publik itu sendiri. Perolehan sumber daya yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi otoritas publik yang khawatir tentang pelaksanaannya.

### **Sejarah Berdirinya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang**

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dan yang dikenal sekarang ini sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu daerah pemerintahan sebagai pusat Kerajaan (kesultanan) Deli. di Kota Medan dan kesultanan Serdang terletak di Kota Medan di Perbaungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Dasar Perkumpulan dan Tata Kerja Musyawarah Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 14 November 2007 Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Deli Serdang dibentuk dan dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.

Bagaimanapun juga, pada tahun 2014 dengan melihat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, salah satu hal yang diteliti adalah penataan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang pada bulan September 2014 dan dimotori oleh seorang pimpinan Badan.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

### **1. Sistem Informasi Akuntansi**

Sebuah kerangka data pembukuan adalah tindakan dari berbagai jenis catatan, perangkat keras, termasuk komputer dan peralatan serta aparat khusus untuk melaksanakan tenaga kerja, dan laporan yang direncanakan dengan kuat dimaksudkan untuk mengubah informasi moneter menjadi data yang dibutuhkan oleh eksekutif ( Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta 2001).

### **2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) menurut pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pedoman Pembukuan Pemerintah Berbasis Akumulasi pada Badan Legislatif Daerah merupakan rangkaian efisien metodologi, penyelenggara, perangkat keras dan komponen yang berbeda. Untuk memahami kapasitas pembukuan dari investigasi bursa hingga pengumuman moneter dalam iklim. asosiasi pemerintah lingkungan.

SAPD pada dasarnya menggabungkan metodologi pembukuan untuk penerimaan kas, teknik pembukuan untuk distribusi uang tunai, sistem pembukuan untuk sumber daya tetap atau properti teritorial dan strategi pembukuan selain uang tunai.

### **3. Pemerintahan Yang Baik**

Pemerintahan yang baik adalah kerangka kerja, di mana orang bekerja, sedangkan kemajuan pelaksanaannya sangat bergantung pada kehormatan dan tanggung jawab. Pemerintahan yang baik adalah pedoman yang sangat inklusif, sehingga menjadi acuan bagi setiap individu yang ketat, dan dapat ditemukan di masyarakat di semua tempat. Apa yang mengakui tindakan Good Governance dalam suatu bangsa adalah Good Governance sebagai kerangka kerja, karena itu harus terus-menerus menyesuaikan dengan keseluruhan perangkat hukum, keadaan dan peningkatan kemajuan, serta cara hidup negara yang sebenarnya. Dalam melaksanakan administrasi yang hebat diperlukan berbagai metodologi yang disesuaikan dengan kondisi. selanjutnya, waktu. Ada dua metodologi, yaitu metodologi yang sarat dengan aturan atau kerangka kerja, kontras dengan metodologi moral (Hard Law) dan metodologi yang lebih menekankan agar tidak terlalu sarat dengan aturan tetapi lebih mengutamakan metodologi moral (Soft Law).

#### 4. Aktiva Tetap

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Aset Pemerintah Daerah adalah aset moneter yang dikuasai serta diklaim oleh negara tetangga karena kejadian-kejadian sebelumnya dan dari mana keuntungan finansial atau potensi ramah masa depan seharusnya didapat, baik oleh legislatif dan jaringan terdekat dan dapat diperkirakan dalam satuan uang tunai, termasuk aset non-moneter yang diharapkan menawarkan jenis bantuan kepada keseluruhan populasi dan aset yang disimpan untuk alasan yang dapat diverifikasi dan sosial.

Indra Bastian (2002: 69) mengacu pada pemikiran tentang sumber daya tetap "Mereka adalah sumber daya yang pasti diperoleh dalam struktur yang disiapkan untuk digunakan atau dengan dibuat sebelumnya, yang digunakan dalam tugas-tugas elemen pemerintah, tidak diharapkan untuk dijual. dalam kerangka pikiran latihan khas zat pemerintah dan memiliki keberadaan yang berharga lebih lama dari pada zat administrasi satu tahun". Sesuai Zaky Baridwan (2004:271) merekomendasikan bahwa "sumber daya tetap adalah sumber daya yang tidak salah lagi yang cukup tahan lama yang digunakan dalam latihan organisasi biasa.

Definisi di atas dapat dianggap bahwa sumber daya yang tepat adalah sumber daya asli atau sumber kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, digunakan dalam latihan (tugas) organisasi dan tidak diharapkan untuk ditukar oleh organisasi.

Sumber daya tetap dalam PSAP No. 07 dicirikan berdasarkan kedekatan sifat atau kapasitasnya dalam pelaksanaan kerja elemen tersebut. Berikutnya adalah karakterisasi sumber daya tetap yang digunakan:

##### a. Tanah

Tanah yang dilimpahkan harta dan perlengkapannya adalah tanah yang diperoleh dengan maksud sepenuhnya untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dalam keadaan siap pakai. Yang diingat untuk pengelompokan tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk bangunan, bangunan, jalan, tata air, dan organisasi. Sesuai Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aktiva Tetap Berbasis Akrua (2014: 3) Menurut kemiringan dan peruntukannya, tanah juga dapat dicirikan menjadi dua kelompok penting, yaitu tanah untuk bangunan dan bangunan, dan tanah untuk bangunan serta non- bangunan, seperti tanah untuk jalan, tata air, organisasi, tanah pertanian, tanah dusun, tanah untuk hortikultura, dan tanah untuk rumah bangsawan. Pengelompokan lahan ini tidak bersifat wajib, namun bergantung pada kebutuhan data yang pasti dari substansi yang bersangkutan.

##### b. Perangkat Keras dan Mesin

Perangkat keras serta perangkat tercantum perangkat serta kendaraan mesin, perlengkapan elektronik, dan seluruh peralatan kantor, serta

perangkat keras yang lain yang nilainya sangat besar serta yang masa pakainya lebih dari 12 tahun serta dalam kondisi siap pakai. Cocok Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aktiva Tetap Berbasis Akrua( 2014: 10) Perlengkapan serta Mesin bisa disusun bagi jenisnya, seperti peralatan kantor, Komputer, peralatan transportasi( darat, air, serta udara), perlengkapan pesan menyurat, perlengkapan klinik, perangkat keras, studio, peralatan atletik, serta tanda- tanda.

#### c. Bangunan

Struktur menggabungkan seluruh struktur serta desain yang diperoleh sepenuhnya untuk digunakan dalam tugas- tugas pemerintah serta dalam kondisi siap gunakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aktiva Tetap Berbasis Akrua( 2014: 16) Bangunan serta struktur dapat dicirikan bagi jenisnya, seperti tempat usaha, rumah dinas, tempat cinta, pembalut, landmark/ bangunan kenangan, pusat distribusi, struktur ruang pameran. Struktur bertingkat pada dasarnya terdiri dari bagian- bagian bangunan yang sebenarnya, bagian- bagian yang sangat mendukung sebagai desain mekanis( lift, instalasi listrik di samping generator, dan kantor pendingin AC), dan bagian pendukung lainnya, termasuk saluran air serta telepon. Tiap bagian memiliki masa manfaat alternatif, sehingga masa pakai kerusakan itu unik, serta memerlukan desain penyangga yang berbeda.

Disarankan bahwa representasi pengakuan struktur tinggi harus pasti sehingga tidak kurang dari satu kerugian untuk setiap bagian bangunan yang memiliki umur manfaat yang sama. Informasi untuk seluk- beluk ini dapat diperoleh dalam 3 catatan penawaran yang menyusun premis kontrak pengembangan untuk pekerjaan pengembangan.

#### d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, sistem dan organisasi air termasuk jalan, sistem dan organisasi air yang dikerjakan oleh otoritas publik dan dimiliki dan dibatasi oleh otoritas publik dan dalam kondisi siap pakai. Jalan- jalan, sistem air dan organisasi digunakan dalam latihan pemerintah dan juga oleh penduduk secara keseluruhan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aktiva Tetap Berbasis Akrua( 2014: 25) Sesuai dengan kebutuhan substansi, sumber daya yang layak ini juga dapat dicirikan menjadi misalnya jalan, bentang, gudang, saluran air, tempat jadian air, industri pembangkit listrik, industri sirkulasi listrik, saluran transmisi gas, industri penyebaran gas, organisasi telepon, dll. Karakterisasi yang pas hendak membuat lebih gampang buat memutuskan strategi sokongan serta strategi kehancuran buat sumber energi yang dirujuk.

#### e. Aset Tetap Lainnya

Sumber daya tetap lainnya menggabungkan properti, pabrik, serta fitur keras yang tidak bisa dikumpulkan ke dalam kumpulan sumber energi senantiasa di atas, yang diperoleh serta digunakan buat latihan fungsional pemerintah serta dalam keadaan siap gunakan. Cocok Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aktiva Senantiasa Berbasis Akrua( 2014: 29) Harta yang diingat untuk penataan Aktiva Tetap Lainnya merupakan koleksi perpustakaan/ buku dan non- buku, barang dagangan pekerjaan/ sosial/ olahraga, makhluk, ikan, dan tumbuhan

Yang diingat guna golongan Aset Tetap Lainnya ialah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya desain ulang khusus untuk sumber daya tetap yang tidak dimilikinya, dan biaya buat segmen ruang kantor yang tidak diklaim olehnya.

#### f. Pengembangan Dalam Pekerjaan

Pengembangan dalam penyelesaian meliputi properti, lini pembuatan serta perlengkapan yang lagi dalam pengembangan tetapi hingga dengan bertepatan pada laporan rencana pengeluaran, belum sepenuhnya berakhir.

### C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 1. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang

Kerangka data pembukuan tergantung pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang strategi pengawasan barang milik daerah, khususnya sebagai berikut: metode penataan, metodologi perolehan, sistem penggunaan, teknik otoritatif, metodologi penggunaan, metodologi pemeliharaan, strategi akhir, strategi pemberantasan.

Dalam pelaksanaannya, pengurus perlu membina flowchart kerangka data pembukuan. Dalam organisasi sumber daya tetap karena banyak faktor, sumber daya tetap adalah bagian terbesar dari sumber daya pemerintah di mana sumber daya pemerintah harus diawasi dengan tepat. Sumber daya tetap termasuk kendaraan, tanah, struktur dan peralatan mesin yang memiliki masa pakai yang cukup lama selain itu biayanya juga mahal sehingga harus ada rencana dukungan yang standar dan baik, sumber daya tetap adalah sumber daya yang berat yang harus dikelola dengan baik karena kehidupan mereka yang bermanfaat dan penyusutan yang akan menyampaikan hasil keuangan.

Disini kita menginginkan sebuah flowchart data pembukuan kerangka kerja dengan fokus pada administrasi yang hebat dan rincian kerangka kerja dalam administrasi sumber daya tetap agar mahir dan menarik dalam mengontrol asset tetap.

## **2. Kesesuaian Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Tata Laksana Pelaporan yang Baik Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang**

Pelaksanaan kerangka data pembukuan di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang telah berjalan secara positif. Misalnya, perolehan sumber daya tetap harus dibuat dengan risalah, catatan sumber daya, kartu stok, nama merek dagang, dukungan dan laporan pendukung lainnya yang harus sesuai dengan sebagian besar pedoman dan norma yang diakui. Demikian pula dengan pembatalan atau pemusnahan sumber daya tetap, serta penguasaan sumber daya tetap.

Menurut apa yang telah dipahami bahwa kerangka data pembukuan (AIS) adalah rencana berbagai jenis catatan, perangkat keras, termasuk PC dan peralatan serta instrumen khusus untuk melaksanakan fakultas, dan laporan terorganisir dengan kuat dimaksudkan untuk mengubah informasi moneter menjadi data yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif (Nugroho Widjajanto). , Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta 2001).

Untuk mengetahui peningkatan penatausahaan dan pengumuman sumber daya tetap pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, sangat baik dapat dilihat dari motivasi yang wajar di balik diadakannya kerangka data pembukuan dan adanya komando orang dalam atas sumber daya tetap. pada Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada lima bagian pengendalian sesuai hipotesis Thomas Sumarsan, yaitu iklim pengendalian yang memuaskan, latihan pengendalian, data dan kerangka korespondensi sehingga keberadaan kelima bagian tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kerangka kerja pengungkapan yang layak. untuk mengendalikan sumber daya tetap. Untuk mengetahui peningkatan penatausahaan dan perincian sumber daya tetap pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dengan hipotesis Wilkson tentang info, hasil, dan interaksi, penanganan informasi, ragam informasi yang jelas.

Penyelenggaraan benda kepunyaan wilayah pada Tubuh Keuangan serta Peninggalan Wilayah Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negara No 19 Tahun 2016 tentang Kesiapan, Pengadaan, Akhir, Pemusnahan, Pemakaian, Dorongan Luar Biasa.

### **D. METODE PENELITIAN**

Sumber data dibatasi menjadi 2( dua) jenis, khususnya sumber data penting dalam studi ini, yaitu pengumpulan langsung spesial yang dipandu oleh Tubuh Keuangan serta Peninggalan Wilayah, sebaliknya sumber informasi diskresioner merupakan riset yang diperoleh dari novel, harian, serta informasi yang lain. bahan. Tipe informasi yang digunakan merupakan tipe informasi emosional yang diperoleh lewat pengumpulan serta pengetahuan. Tipe evaluasi yang digunakan dalam investigasi ini merupakan tipe investigasi alternatif.

Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2011: 147), penelitian yang menarik adalah suatu metode untuk menggambarkan atau menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan. Area pemeriksaan berada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Bersumber pada hasil riset yang dicoba oleh periset, bisa disimpulkan bahwa:

- a. Kerangka data pembukuan yang ada di Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, khususnya di setiap kerangka, telah berjalan secara keseluruhan. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam kerangka tersebut, antara lain: pemakaian serta keamanan dan kekurangan flowchart dalam organisasi produk/ barang dagangan provinsi dalam kerangka data pembukuan.
- b. Pemanfaatan kerangka data pembukuan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negara No 19 Tahun 2016 yang disesuaikan dengan norma pembukuan pemerintah dalam tentang penatausahaan barang milik daerah, jadi persiapan eksklusif, kebutuhan dan perencanaan, perolehan, pemakaian, pemakaian, keamanan dan dukungan, pemeriksaan, pembuangan, pemindahan, pengorganisasian, pengarah, pengawasan, dan pengendalian dan tujuan yang jelas dalam penyelenggaraan sumber daya tetap dengan standar keterusterangan dan tanggung jawab.

### **2.Saran**

Gagasan untuk ujian ini dengan asumsi itu berguna bagi lembaga keuangan dan sumber daya dalam menyelesaikan kewajiban mereka dengan lebih baik. Saran yang bisa saya berikan adalah:

- a. Disarankan kepada Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang untuk membuat flowchart yang berwenang untuk penanganan sumber daya tetap. Baik itu metode pembelian sumber daya, metodologi diskon, teknik penghapusan sumber daya yang tepat.
- b. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang membuat kerangka pengamatan untuk pengendalian sumber daya tetap karena banyaknya sumber daya yang harus dibayar.

## **DAFTAR PUSTAKA**





- Harmain, Hendra. dkk. 2019. *Pengantar Akuntansi 1 Edisi 3*. Medan : MADENATERA.  
<https://disnaker.deliserdangkab.go.id/wp-content/1617098746.pdf> diakses pada 12 Maret 2022, pukul 00:11
- Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur'an. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2015. Penerjemah. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanum Harahap, Seprida. dkk. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: Citapustaka Media.
- Maron. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta:Grapindo.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Jakarta :Salemba Empat.
- Hall, James A. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyono. 2008. *Memahami Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2). Diakses pada tanggal 13 Maret 2022, Pukul 11:27  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111750/permendagri-no-64-tahun-2013#:~:text=PERMENDAGRI%20No.%2064%20Tahun%202013,Pemerintah%20Daerah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 14:02
- Khafiyya, N. A. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 5(3), 410-431. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 14:12